KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Stop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana - DPR Tak Ingin BNPB Hilang
Tanggal : Jumat, 03 Juni 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Stop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Tak Ingin BNPB Hilang

Senayan menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Langkah ini terpaksa dilakukan, lantaran tidak ada titik temu dengan Pemerintah soal pelembagaan penanggulangan bencana.

PEMERINTAH menginginkan lembaga penanggulangan bencana cukup diatur dengan penyebutan badan. Hal ini kontras dengan DPR yang justru menghendaki agar persoalan bencana pelembagaannya diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Senayan tak ingin lembaga BNPB hilang.

"Sesungguhnya Komisi VIII berniat memperkuat BNPB, namun nampaknya dari Pemerintah ada miskomunikasi siapa *leader* penanggulangan bencana," jelas anggota Komisi VIII DPR John Kennedy Azis. Politisi Golkar ini menegaskan, Komisi VIII menghendaki BNPB bisa kuat, mandiri, baik dalam sisi anggaran maupun dalam sisi strukturalnya. Di undang-undang eksisting yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, di bab kelembagaan dengan lugas disebut BNPB.

"Inilah yang tidak bisa kita pertemukan. Antara Kementerian Sosial dengan DPR tidak ada kesepahaman sehingga terhenti. RUU ini diputuskan (dihentikan pembahasannya) dalam rapat paripurna," jelasnya di Jakarta, kemarin.

Dengan penghentian ini, lanjutnya, undang-undang eksisting yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tetap menjadi dasar hukum dalam setiap aspek penanggulangan bencana.

"Mudah-mudahan suatu waktu nanti ada kesepahaman dan kita perkuat kembali BNPB," harapnya.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengakui, penghentian pembahasan RUU ini disebabkan adanya perbedaan rumusan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB.

DPR menghendaki lembaga BNPB secara eksplisit disebutkan dalam RUU. Sementara Pemerintah menghendaki cukup diisi dengan kata-kata badan.

"Dengan alasan memberikan fleksibilitas kepada Presiden," kata Yandri, kemarin.

Yandri menegaskan, pihaknya telah berupaya meyakinkan Pemerintah melalui berbagai lobi-lobi dan serangkaian pembahasan terhadap RUU ini. Namun sayang, lobi tak kunjung menemukan kesepahaman. Perbedaan sikap antara DPR dan pemerintah ini terus terjadi.

"Pada rapat kerja 13 April diambil kesimpulan Komisi VIII DPR, DPD, dan Pemerintah sepakat menghentikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana pada tingkat I. Karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan," jelasnya. ■ KAL